



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS KESEHATAN

JL. CUT NYAK DIEN III P E K A N B A R U TELP. (0761) 23810 –  
26032, FAX (0761) 24260

Website : <http://dinkes.riau.go.id> Email : [dinaskesehatan@riau.go.id](mailto:dinaskesehatan@riau.go.id)

---

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**NOMOR : 188.4/Sekre-Perenprog/384**

**TENTANG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU  
TENTANG REVIEW DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU,**

- Mengingat** :
- a. bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Riau memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah dan prioritas pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau;
  - b. bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah terlihat pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 – 2019;
  - c. bahwa dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pembangunan Kesehatan Kesehatan Provinsi Riau sebagai tolak ukur Keberhasilan Pembangunan kesehatan di Provinsi Riau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau tentang Review dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

- Menimbang** :
1. Undang-undang RI Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  7. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
23. Peraturan gubernur Riau Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi Riau;

24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 113 Tahun 2016  
tentang Penetapan Indikator Kinerja Program  
Pembangunan Provinsi Riau

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU : Reviuw dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- KEDUA : Reviuw dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Riau terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman untuk Perencanaan Bidang/UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor : 188.4/Sekre-Perenprog/1039 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor 050/Sekr-1/I/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kegiatan Pembangunan Provinsi Riau dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor : 188.4/Sekre-Perenprog/844 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kegiatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Riau TA. 2017-2019 dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku mundur sejak tanggal September 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru

Pada tanggal : 04 September 2017

KOPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI RIAU



Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt.MM


**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19660717 199102 2 001**

			<b>LAMPIRAN I</b>	<b>: KEPUTUSAN KADISKES PROVINSI RIAU</b>	
			<b>NOMOR</b>	<b>: 188.4/Sekre-Perenprog/ 384</b>	
			<b>TANGGAL</b>	<b>: 4 SEPTEMBER 2017</b>	
<b>LAMA (SEBELUM REVIUEW)</b>					
No	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN 2016		Penjelasan
			TARGET	KATERANGAN	
1	2	3	4	7	
1	Prevalensi Gizi Buruk pada Balita	Jumlah balita gizi buruk (BB/U) dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang	1,4	capaian prevalensi gizi buruk termasuk kategori sangat baik	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator keluarga sehat
2	Persentase cakupan pelayanan puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta	Jumlah pasien yang datang ke PKM dan RS yang dilayani	100%		Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
	a. Persentase RS pemerintah dan swasta yg terakreditasi versi 2012	Jumlah RS Pemerintah dan swasta yg terakreditasi versi 2012 dibandingkan dengan jumlah RS Pemerintah	50%	Masih sedikitnya RS Pemerintah yang terakreditasi disebabkan karena biaya akreditasi yang mahal, sarana prasarana dan SDM yang dimiliki rumah sakit belum sesuai standar, dan ada beberapa rumah sakit sudah mendaftar untuk penilaian tetapi masih menunggu antrian dari KARS	Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
	b. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	Jumlah puskesmas yg terakreditasi versi 2012 dibandingkan dengan jumlah puskesmas	0		Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
3	Angka kesakitan penyakit menular	tidak menjadi indikator di tahun 2016			
	a. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk (IR)	Jumlah penduduk yang terinfeksi penyakit DBD pada populasi 100.000 penduduk	49 per 100,000 penduduk	1. Diagosa tidak ditegakkan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sesuai SOP.	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
	b. Angka Kematian DBD (CFR)	tidak menjadi indikator di tahun 2016		2. Penegakan Diagnosis di PKM terlambat, Keterlambatan rujukan	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit

	c. Persentase Kab/kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	Jumlah Kab/Kota dengan angka kesakitan < 49 per 100.000 penduduk dibagi total Kab/Kota endemis DBD pada tahun yang sama	62%	3. Kemampuan dokter dalam penatalaksanaan DBD masih kurang, belum semua puskesmas mempunyai tenaga lab terlatih.	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
				4. Sarana laboratorium dan keterbatasan RDT, manset anak di Puskesmas tidak lengkap	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
				5. PSN 3M plus tidak dilaksanakan secara rutin	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
				6. Kepadatan jentik masih tinggi (ABJ < 95%) di semua lokasi KLB	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
				7. Petugas Puskesmas tidak melakukan pemantauan jentik berkala.	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
	d. Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah Kab/Kota yang telah mencapai API < 1 per 10.000 penduduk dalam periode satu tahun	7 kab/kota	Kab/Kota yang mencapai eliminasi malaria adalah pku, dumai, kuansing, rohul, meranti, bengkalis, siak, inhu, rohil	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
4	Prevalensi HIV/AIDS pada kelompok risiko tinggi	Persentase penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV	< 5%	1. Capaian Prevalensi sangat memuaskan karena < 5% pada popkun, tapi hal ini belum menggambarkan prevalensi Riau yang sesungguhnya. (3 kab)	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
				2. Dengan kurangnya dukungan dana APBD Kab/Kota untuk prog HIV/AIDS, maka kab/kota tdk menganggarkan dana untuk kegiatan sero survey	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
5	Persentase Penggunaan Obat Rasional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)	65%		Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
6	a. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	Jumlah sampel yang diperiksa pada penyelenggaraan air minum di bagi jumlah sampel yang harus diperiksa di kali seratus persen	Tidak menjadi Indikator 2016		Indikator ini sudah termasuk dalam indikator keluarga sehat
	b. Persentase kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	25%	Indikator baru 2016	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator keluarga sehat



7	Persentase tenaga medis dan paramedis per 100,000 penduduk				
	a. Ratio dokter terhadap 100.000 penduduk	Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan disuatu wilayah Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana Pelayanan Kesehatan lain per 100.000 penduduk	40/100.000 penduduk	Kurangnya tenaga dokter umum difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
	b. Ratio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk	Dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan disuatu wilayah (di puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) per 100,000 penduduk	11/100.000 penduduk	Kurangnya tenaga dokter gigi difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
	c. Ratio bidan terhadap 100.000 penduduk	Tenaga Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan disuatu wilayah ( di puskesmas, Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk	100/100.000 penduduk	Kurangnya tenaga bidan difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
	d. Ratio perawat terhadap 100.000 penduduk	Tenaga perawat yang memberikan pelayanan kesehatan disuatu wilayah (di puskesmas, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain ) per 100.000 penduduk	118/100.000 penduduk	Kurangnya tenaga perawat difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
	e. Ratio dokter spesialis terhadap 100.000 penduduk	Dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan disuatu wilayah (di Puskesmas, Rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000 penduduk	9/100.000 penduduk		Indikator ini sudah termasuk dalam hasil dari Akreditasi Puskesmas dan RSUD
8	Jumlah puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu dibagi jumlah puskesmas di Indonesia dikali dengan 100%	20%	SDM yang belum terlatih, Sarana dan Prasarana belum memadai untuk layanan Pandu PTM di FKTP	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
9	Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS dibagi rumah tangga yang ada dikali seratus persen	50%	Capaian rumah tangga berPHBS di pengaruhi oleh 10 indikator, salah satunya indikator tidak merokok. Jika salah seorang anggota RT ada yang merokok maka rumah tangga tsb tdk berPHBS	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator keluarga sehat
10	Persentase krisis Kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 jam	Jumlah KLB yang dilakukan penanggulangan dibagi dengan jumlah KLB yang terjadi	100%	Data masih 10 kab/kota	Indikator ini sudah termasuk dalam indikator pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit
11	Presentase Penduduk (termasuk penduduk miskin dan tidak mampu) mempunyai jaminan melalui Jaminan Kesehatan nasional	Jumlah penduduk (termasuk penduduk miskin dan tidak mampu) yang mempunyai jaminan kesehatan	70%		Indikator ini sudah termasuk dalam indikator keluarga sehat
 <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau</p> <p style="text-align: right;"><b>Dra. Hj. M. Ni Yuliani Nazir, Apt, MM</b> Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19660717 199102 2 001</p>					

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KADISKES PROVINSI RIAU  
 NOMOR : 188.4/Sekre-Perenprog 384  
 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017

BARU (SETELAH REVIEWS)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	TARGET	PENJELASAN
				2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Pengendalian Angka Mortalitas dan Morbiditas di Prov. Riau	Terkendalinya kejadian Mortalitas dan morbiditas di Prov. Riau	Angka Mortalitas dan Morbiditas	<b>Mortalitas</b> 1. Jumlah Kematian Bayi = < 1.005 2. Jumlah Kematian Balita = < 1.053 3. Jumlah Kematian Ibu = < 131  <b>Morbiditas</b> 1. Succes Rate TB => 83,74% 2. Persentase Jumlah kasus Baru HIV per 1.000 pddk = < 0,5% 3. Persentase Penduduk usia > 18 Tahun dengan tekanan darah tinggi = < 24,48% 4. Persentase Penduduk Usia > 18 Tahun dengan gula darah tinggi = <2,30%	<b>Mortalitas</b> 1. Jumlah Kematian Bayi = < 1.005 2. Jumlah Kematian Balita = < 1.053 3. Jumlah Kematian Ibu = < 131  <b>Morbiditas</b> 1. Succes Rate TB => 83,74% 2. Persentase Jumlah kasus Baru HIV per 1.000 pddk = < 0,5% 3. Persentase Penduduk usia > 18 Tahun dengan tekanan darah tinggi = < 24,48% 4. Persentase Penduduk Usia > 18 Tahun dengan gula darah tinggi = <2,30%	Merupakan Indikator Yang Disetujui KemenPAN-RB
2	Penguatan kinerja manajemen, Adminstrasi dan Keuangan	Terwujudnya Tertib Adminstrasi dan Manajemen Keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi	Persentase temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan penggunaan anggaran keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	



Dinas Kesehatan Provinsi Riau  
 Dra. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM  
 Pembina Utama Muda / IV c  
 NIP. 19660717 199102 2 001